



PERDA KOTA LAYAK ANAK

Pansus Sampaikan 29 Poin Rekomendasi

UMBULHARJO (MERA-PD - Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Pengawasan Pelaksanaan Perda Kota Layak Anak merekomendasikan 29 poin kepada Pemkot Yogyakarta untuk menguatkan pelaksanaan perda itu. Salah satu poin rekomendasi menyoroti pernikahan usia dini karena dinilai sudah mengkhawatirkan.

Ketua Pansus Pembahas Pengawasan Pelaksanaan Perda Kota Layak Anak (KLA) DPRD Kota Yogyakarta Dwi

Budi Utomo mengatakan, berdasarkan fakta di lapangan, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi anak, di antaranya fenomena penyalahgunaan narkoba kekerasan anak, kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini serta perceraian.

"Fenomena-fenomena itu sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Ini harus segera diantisipasi dan diatasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," kata Dwi Budi, Minggu (11/8).

Menurutnya persoalan itu penting menjadi hal yang harus diatasi untuk mendukung terwujudnya Yogya Kota Layak Anak. Untuk itu pansus juga merekomendasikan terkait penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak. Sinergi itu juga harus didukung kebijakan strategis dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Angka perkawinan anak yang disebabkan kehamilan di

luar nikah masih cukup tinggi. Perlu ada upaya serius untuk mengatasi hal ini. Misalnya pendidikan kespro bagi siswa juga harus disertai dengan pendekatan spiritual," paparnya.

Selain itu perlu adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk memberikan pelayanan pendampingan konsultasi bagi keluarga. Termasuk kegiatan Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja khususnya terkait dengan materi-materi pengesahan juga perlu digiatkan. Pemkot Yogyakarta juga diminta menyediakan konselor klinis untuk konsultasi perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan.

"Dengan banyaknya kasus yang terjadi pada anak yang muaranya berasal dari keluarga, menghatkannya Raperda Ketahanan Keluarga," ucap Dwi Budi.

Pansus juga meminta adanya alur yang jelas dalam optimalisasi fungsi kampung ramah anak. Ke depan, semua RW di Kota Yogyakarta juga harus memberikan dukungan terhadap eksistensi kampung ramah anak untuk mempersiapkan anak-anak menjadi generasi berkualitas. Mengingat komposisi penduduk Indonesia pada 2030-2040 yang akan didominasi usia produktif.

Bonus demografi ini harus bisa disiapkan sejak dini dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan pendidikan karakter," ujarnya.

Menanggapi rekomendasi itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Edy Muhammad menyatakan sudah melakukan koordinasi dengan dinas lainnya untuk mengatasi dan menegakkan pernikahan usia dini. Misalnya dengan Kementerian Agama terkait rekomendasi pernikahan anak diminimalisir kecuali ada karena kondisi mewajibkan rekomendasi pernikahan. Selain itu akan mengembangkan peran unit kesehatan sekolah (UKS).

"Kami koordinasi dengan lintas OPD terkait untuk merintis pengembangan peran UKS seperti interaksi karakter, kesehatan reproduksi, literasi dan tentang konsensi hak anak," tambah Edy.

Pihaknya juga sudah melakukan komunikasi kepada komunitas pengusaha untuk mendukung kota layak anak dengan target membentuk asosiasi pengusaha sahabat anak. Sedangkan terkait kampung ramah anak ke depan nantinya tidak hanya anggaran dari APBD. Tapi wilayah juga didorong berperan lewat dana kelurahan.

Instansi		Lanjut
1. <u>Bag. Hukum</u>		(Tri)-m
2. <u>DPMPPA</u>		anggapai

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PMPPA			

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005